EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO MELALUI SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DALAM MENCEGAH PENYEBARAN PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

OLEH:

NURUL FAHILAH

17042228

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	:	Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19
Nama	:	Nurul Fahilah
TM/NIM	:	2017/17042228
Program Studi	:	Ilmu Administasi Negara
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakutas	:	Ilmu Sosial

Padang, 30 Agustus 2021

Disetujui oleh,
Pembimbing

Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA
NIP. 198406062008121003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB-15.00 WIB

Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19

Nama	: Nurul Fahilah
TM/NIM	: 2017/17042228
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 30 Agustus 2021

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA	1.
Anggota	Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	2.
Anggota	Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	3.

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Dr. Sitti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Fahilah

TM/NIM : 2017/17042228

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19"** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi day aini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

Nurul Fahilah

2017/17042228

ABSTRAK

Nurul Fahilah (2017/17042228) : Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19

Pembimbing : Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kinerja pemerintah Kota Sawahlunto melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektifitas kinerja pemerintah Kota Saeahlunto melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Sawahlunto melalui kebijakan yang diterapkan sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi hasil dari kebijakan tersebut belum efektif karena masih terdapat kendala seperti terbatasnya anggaran dan masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19. Sedangkan faktor pendorong dan penghambat efektivitas kinerja pemerintah Kota Sawahlunto melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 antara lain: 1. faktor pendukung yang terdiri dari (a) adanya sosialisasi dan edukasi dari Pemerintah Kota Sawahlunto kepada masyarakat tentang protokol kesehatan Covid-19. (b) Adanya komunikasi dan kerjasama antar instansi yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Sawahlunto. 2. faktor penghambatnya yaitu (a) terbatasnya anggaran Pemerintah (b) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Kata Kunci : Efektivitas, Pencegahan Penyebaran, Covid-19

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanangan Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19". Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang

2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

4. Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Penguji Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran terkait kegiatan akademik perkuliahan

5. Bapak Dr. Zikri Alhadi, S. IP., M.A selaku Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini

6. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengatahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan

8. Seluruh staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik & Penanggulangan Bencan Daerah, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Sawahlunto yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian

9. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis Bapak Drs. Eldasrizal dan Ibu Hj. Nurhalili, SE yang sangat penulis cintai, serta saudara/saudari kandung penulis Abang Muhammd Farid dan Adik Rahmi Dwi Putri yang sudah memberikan doa, harapan, dukungan dan motivasi berharga kepada penulis untuk melancarkan pembuatan skripsi ini

10. Teruntuk kilat sahabat penulis Ii, Tesa, Ketty, Rezza, Fhaza dan Usi yang selalu memberikan semangat dan menghibur kepada penulis

11. Teruntuk teman-teman seperjuangan selama berada di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Nabella, Pratamireza, Rezza Fitri, Yofa, Zhillan dan Intan terimakasih untuk kebersamaan, hari-hari yang menyenangkan, dan telah memberikan semangat yang membangun kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, Agustus 2021

Penulis

Nurul Fahilah (17042228)

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Pembatasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN. **12**
A. Kajian Teoritis 12
1. Konsep Efektivitas 12
a. Pengertian Efektivitas 12
b. Indikator Efektivitas 14
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 19
2. Konsep Kinerja 20
a. Pengertian Kinerja 20
b. Faktor-Faktor Kinerja 27
c. Indikator Kinerja 28
3. Konsep Efektivitas Kinerja 29
4. Konsep Pemerintah Daerah 31
a. Pengertian Pemerintah Daerah 31
b. Peran Pemerintah Kota Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19 33
B. Kajian Penelitian Yang Relevan 34
C. Kerangka Konseptual 36

BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Jenis Penelitian 38
B. Lokasi Penelitian 39
C. Informan Penelitian 39
D. Jenis dan Sumber Data 40
E. Instrumen Penelitian 43
F. Uji Keabsahan Data 43
G. Teknik Analisis Data 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **47**
A. Temuan Umum Penelitian 47
1. Gambaran Umum Kota Sawahlunto 47
2. Gambaran Umum Covid-19 Di Kota Sawahlunto 48

3. Tupoksi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 50
4. Fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 57
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 59
B. Temuan Khusus 60
1. Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19 61
2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Efektivitas Kinerja PemerintahKota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19 85
C. Pembahasan 94
1. Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19 94
a. Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai 95
b. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan 96
c. Proses Analisa Dan Perumusan Kebijakan Yang Mantap 97
d. Perencanaan Yang Matang 98
e. Penyusunan Program Yang Tepat 99
f. Tersedia Sarana Dan Prasarana Kerja 100
g. Pelaksanaan Yang Efektif Dan Efisien 102
h. Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Yang Bersifat Mendidik 103
2. Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19 104
a. Faktor Pendukung 105
b. Faktor Penghambat 106

BAB V PENUTUP 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 110
LAMPIRAN

Daftar Tabel

Halaman

1. Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian 40
2. Tabel 4.1 Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....48

Daftar Gambar

1. Gambar Sebaran Kasus Positif Covid-19, Sembuh dan Meninggal Per Kecamatan Se Kota Sawahlunto s/d 21 Juli 2021 47
2. Gambar Sebaran Kasus Covid-19 se Kota Sawahlunto berdasarkan Pekerjaan s/d 21 Juli 2021 50
3. Gambar Pakta Integritas.....82

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 dunia dihadapkan pada bencana wabah *Corona Virus Disaese* 2019. *Corona Virus Disease* 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (*SARS CoV-2*) yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, Desember 2019 (wikipedia, 2020).

Tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Orga*nization (WHO) menaikkan status penyebaran Covid-19 sebagai pandemi, karena peningkatan jumlah kasus yang begitu cepat serta menyebar luas ke seluruh dunia. Merebaknya virus tersebut telah mengakibatkan seluruh dunia mengalami dampak yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan baik dari segi ekonomi, pendidikan serta kesehatan.

Langkah yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 2020. Gugus Tugas Percepatan Penangangan *Coronavirus Disease* 2019 adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan setiap kegiatan antar lembaga-lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyakit Covid-19 di Indonesia. Gugus tugas ini berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan melibatkan berbagai lembaga, kementerian, dan unit lainnya seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Tentara Negara Indonesia, dan pemerintah di daerah. Gugus tugas ini juga ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan dan rukun tetangga.

Dalam meminimalisir penyebaran Covid-19, pemerintah sudah menerapkan berbagai macam aturan seperti *Physical Distancing* (jaga jarak), kebijakan *Lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga New Norrmal yang biasa disebut dengan Adaptasi Kebiasaan Baru. Tujuannya untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dan dengan tidak mengesampingkan aspek kesehatan. Dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru ini setiap masyarakat wajib untuk mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker pada saat keluar rumah, dan sebagainya.

Beni (2016:69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prodesur dari suatu organisasi. Efektivitas ini juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas kinerja akan meningkat apabila seseorang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan kerja. Efektivitas kinerja individu dapat diukur dari keterampilan kerja, peningkatan prestasi, kemampuan untuk beradaptasi, dan mampu menghadapi perubahan (Bass dan Daft, 1989).

Sawahlunto merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Barat dengan luas 27.345 Ha (273,45km2) atau sekitar 0,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat dengan jarak ke Ibu Kota Provinsi (Padang) 94 km yang dapat ditempuh melalui jalur darat. Pada bulan Mei 2020 lalu, terdapat warga Sawahlunto yang terkonfirmasi virus Covid-19. Hal ini menyebabkan Sawahlunto tidak lagi berstatus zona hijau. Kemudian Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan test swab sebanyak 1600 warga dan dua orang diantaranya terkonfirmasi positif Covid-19. Test ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeteksi dini, sehingga bisa cepat memutuskan rantai penyebaran Covid-19 yang terbilang cepat penularannya.

Seiring berjalannya waktu kasus positif Covid-19 di Kota Sawahlunto terus bertambah. Berdasarkan tinjauan penulis di lapangan dan hasil koordinasi dengan pihak terkait masih ditemukan adanya warga sekitar yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Peraturan S*ocial Distancing* pun masih sering dilanggar oleh masyarakat kota. Selain itu penulis juga mendapatkan informasi bahwa penyebab bertambah nya angka positif Covid-19 di wilayah ini adalah pegawai yang pulang dari luar daerah dengan catatan angka positif Covid-19 yang tinggi di daerah tersebut kemudian kembali ke Sawahlunto dan tanpa disadari menularkan virus ini ke keluarga atau kerabatnya. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah terus menghimbau agar masyarakat terus meningkatkan pemantauan terhadap pendatang dari luar terkhususnya yang berasal dari zona merah.

Kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 juga banyak menimbulkan masalah sosial ditengah masyarakat. Khususnya pada saat pemerintah menjalankan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Masalah tersebut muncul terutama pada usaha kecil menengah atau sektor informal yang menjadi salah satu bantalan perekonomian Indonesia sangat merasakan dampaknya.

Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi telah membatasi interaksi fisik antar masyarakat, sehingga berbagai aktivitas ekonomi secara informal menjadi terpukul. Untuk mengatasi hal ini pemerintah harus mampu melakukan pemulihan ekonomi agar masyarakat yang ekonominya kelas menengah ke bawah tidak mengalami kesulitan.

Walikota Sawahlunto beserta jajarannya terus menghimbau masyarakat melalui pertemuan di kelurahan, kecamatan dan kota, serta saat Khutbah Jumat. Bahkan pemerintah bekerja sama dengan TNI&Polri dan petugas Satpol PP melakukan razia dadakan ke tempat-tempat yang banyak dilalui oleh masyarakat. Jika ada yang melanggar maka diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut.

Pemerintah sangat membutuhkan pemahaman yang intensif mengenai Covid-19 serta cara menanggulanginya agar angka penyebaran tidak semakin meningkat. Mengingat banyak sekali masyarakat yang masih meremehkan adanya Covid-19 ini. Sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai permasalahan penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

Di dalam penanganan kasus positif Covid-19, jika terdapat yang positif akan langsung dilakukan tracing serta di karantina di gedung Ombilin Mines Training Collage (OMTC) sampai menunggu hasil negatif. Setelah negatif akan dipindahkan ke wisma W39 selama seminggu untuk selanjutnya di test lagi apakah hasilnya tetap negatif atau bahkan bisa kembali positif sesuai dengan daya tahan tubuh. Apabila test nya benar-benar negatif maka pasien langsung diperbolehkan pulang ke rumah.

Dalam menjalankan kebijakan penegakan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan Covid-19 di Kota Sawahlunto, pemerintah Kota Sawahlunto berpedoman kepada Perda Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang mengatakan bahwa dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Sumatera Barat diperlukan upaya terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Terdapat Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru disebutkan bahwa Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, melindungi masyarakat dari dampak Covid-19, mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, dan memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan

Pengendalian Covid-19 bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penanggung jawab kegiatan/usaha masyarakat.

Dalam upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini juga dibutuhkan bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO atau pihak terkait. Namun hal itu belum optimal dilakukan di Kota Sawahlunto karena masih banyaknya organisasi-organisasi yang kurang peduli terhadap pencegahan Covid-19 sehingga masih banyak masyarakat yang tidak patuh.

Transparansi informasi Covid-19 dari pemerintah diharapkan selalu *up to date* sehingga tidak terjadinya *hoaks* di masyarakat. Pemerintah perlu memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang perkembangan virus di Kota Sawahlunto. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar membangun kesadaran bersama untuk melakukan upaya pencegahan. Komunikasi pemerintah yang transparan akan memberikan ketenangan dan kepercayaan publik pada kinerja pemerintah dalam upaya pencegahan Covid-19 akan meningkat.

Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru ini merupakan produk hukum mendatori, yang bisa langsung diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Pembentukan Perda ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dengan mempedomani UU Nomor 12 Tahun 2011. Dan sesuai dengan surat Keputusan Walikota Nomor 120 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Sawahlunto, yang bertujuan untuk memudahkan pertugas dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini.

Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan

Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Tetapi sampai saat ini masih belum berjalan dengan optimal karena masih kurang nya tenaga medis dan pembatu pelayanan kesehatan di Kota Sawahlunto.

Dalam kegiatan pra observasi ini, penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto Ibu Ir. Yulianti pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, beliau mengatakan bahwa :

"Walikota Sawahlunto beserta jajaran Pemda khususnya gugus Covid-19 terus menghimbau masyarakat melalui ceramah-ceramah jumat, pertemuan-pertemuan di kelurahan ,kecamatan dan tingkat kota. Bahkan Satpol PP selalu melakukan razia mendadak ditempat-tempat yang banyak dilalui oleh masyarakat. Tetapi masih banyak masyarakat yang masih cuek, tidak peduli, terutama di pasar. Masih banyak pedagang maupun pembeli yang tidak menggunakan masker. Dan sebaiknya untuk keluar rumah menggunakan makser medis. Untuk saat ini, di Kota Sawahhlunto masih terdapat kasus positif dan pemerintah melakukan tracing di lingkungan sekitar. Masyarakat sebagian ada yang mengganggap bahwa Covid-19 sebagai akalan pemerintah, dan isu belaka. Covid-19 ini tidak perlu ditakuti, semampunya pemerintah selalu mengingatkan agar selalu mematuhi 3M yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan memakai masker".

Selain dengan Sekretaris Kesbangpol dan PBD, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Tribuana,SH sebagai Kasi Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PNS) di Kantor Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Beliau mengatakan bahwa :

"Kota Sawahlunto sudah menerapkan Perda AKB pada Bulan Oktober 2020. Pemerintah Kota Sawahlunto khususnya Satpol PP selalu melakukan razia (operasi justisi) yang bersifat tim dan gabungan dengan pihak kepolisian pada saat hari pasar atau hari yang kemungkinan orang-orang banyak melakkukan aktivitas. Tetapi untuk sekarang ini (tahun 2021) kegiatan tersebut dihentikan karena menunggu kebijakan dari pusat dan tergantung anggaran yang digunakan. Walaupun demikian, Pemda Kota Sawahlunto masih tetap melaksanakan pengawasan. Tim yang turun ke lapangan juga membutuhkan anggaran, apalagi sampai saat ini anggaran tersebut belum cair. Terkait dengan pasien yang terpapar Covid-19 tetap di karantina di gedung OMTC sampai pemeriksaan selanjtnya negatif. Saat pemulihan ini pasien tidak dipungut biaya karena anggaran untuk penanganan sudah disediakan sedangkan anggaran untuk penindakan/pelaksanaan untuk tim yang turun ke lapangan belum".

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada awal Januari 2021. Langkah ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi munculnya aksi terpadu untuk mencegah penularan Covid-19 antara pusat, daerah, dan antardaerah itu sendiri.

Melihat berbagai permasalahan yang ada tersebut, maka penulis ingin melihat kinerja apa yang dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto terkait dengan pencegahan penyebarran Covid-19 di Kota Sawahlunto. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Dari permasalahan yang telah diuraikan

diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah :

1. Masih lemahnya edukasi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya nya Covid-19.
2. Masih lemahnya pengawasan pemerintah dalam pemulihan ekonomi agar masyarakat pada masa pandemi Covid-19.
3. Masih terbatasnya anggaran pemerintah dalam menangani kasus Covid-19.
4. Masih rendahnya kepedulian masyarakat Kota Sawahlunto terhadap protokol kesehatan.
5. Kurang adanya transparansi informasi terkait kasus Covid-19 antara pemerintah dengan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu "**Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19**".

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Sawahlunto?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Sawahlunto.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait, terutama yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

   Dilihat dari dimensi akademis penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi perbandingan untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam meningkatkan efektivitas kinerja sehingga pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dapat terlaksana dengan baik dan dapat meminimalisir angka penambahan kasus positif setiap harinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris effective artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Pasolong (2010 : 3) mengatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Zaidan Nawawi (2013:190) menyatakan efektivitas yaitu hubungan antara out put dan tujuan, dimana efektivitas di ukur berdasarkan seberapa jauh tingkat out put, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Efektivitas secara umum menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Beni (2016:69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat dikatakan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prodesur dari suatu organisasi. Efektivitas ini juga berhubungan dengan derajat

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2017:134) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi itu telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas berupa gambaran jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Mahmudi (2010:143) menyatakan efektivitas merupakan hubungan antaraa keluaran dengan tujuan sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan akhir kebijakan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana dan prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa suatu kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Ravianto (2014:11) menyatakan bahwa efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Maksudnya adalah apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan awal, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Sondang P. Siagian dalam Putri

(2014:77) menyatakan bahwa efektivitas sebagai keberhasilan penerapan sasaran yang telah ditetapkan. Ini artinya jika kegiatan semakin mendekati sasaran, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Dari pengertian diatas, efektivitas dapat dikatakan sebagai suatu keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari 2 (dua) sudut pandang. Sudut pandang pertama, dilihat dari "hasil" maka tujuan yang dikehendaki telah tercapai. Kedua dilihat dari segi "usaha" yang dilakukan telah tercapai, sesuai dengan yang ditentukan. Oleh karena itu, efektivitas dapat dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu baik dari segi hasil maupun usaha yang diukur dengan mutu, jumlah serta waktu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, Karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Indriastuti, 2012).

Ada 5 kriteria pengukuran efektivitas menurut Tangkilisan (2005:141):

1. Produktivitas.

2. Kemampuan adaptasi kerja.

3. Kepuasan kerja.

4. Kemampuan berlaba.

5. Pencarian sumber daya.

Ada beberapa indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi. Menurut Sondang P. Siagian (2011:77) terdapat delapan indikator untuk mengukur efektivitas organisasi sebagai berikut :

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, proses pencapai tujuan akan lebih lancar, tertib, dan efektif apabila ditanamkan rasa kesadaran dan keyakinan mendalam pada pribadi semua anggota organisasi, maka dalam pelaksanaan tugasnya dapat mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

2) Kejelasan strategis pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategis adalah"pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategis yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, maka para pelaksanaa akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6) Tersedia sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan menyediakan sarana dan prasarana yang oleh organisasi akan menghasikan kerja yang produktif untuk kemajuan organisasi.

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, sebagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tidak akan mencapai sasaran, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan. Tujuan yang jelas, strategi yang tepat, proses yang efektif, matangnya rencana, tepatnya penjabaran rencana dalam program dan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas masih harus ditunjukkan oleh kegiatan operasional yang efektif dan efisien.

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya Steers dalam Edy Sutrisno (2011:133), mengatakan yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu :

a) Optimalisasi tujuan-tujuan
b) Perspektif sistem
c) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi

Cara seperti ini disebut ancangan berdimensi ganda, dan lebih objektif daripada hanya menggunakan satu ancangan saja, misalnya hanya segi tujuan. Dengan ancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenalinya bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya sering saling bertentangan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan.

Yang dimaksud dengan ancangan sistem ialah menggunakan sistem terbuka, yaitu pandangan terhadap organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Dengan ancangan ini perhatian lebih diarahkan pada persoalan persoalan mengenai saling hubungan, struktur dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen ialah input, proses dan output. Suatu organisasi menerima input dari lingkungannya, kemudian memprosesnya, dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya.

Ketiga, ialah perilaku manusia dalam organisasi. Ancangan ini digunakan karena atas dasar realitanya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya

selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Justru karena faktor manusianya itulah suatu organisasi dapat efektif, tetapi juga faktor manusialah suatu organisasi tidak efektif.

Indikator selanjutnya untuk mengukur efektivitas Menurut Ducan dalam Regina Priska (2013), dimana terdapat beberapa kriteria digunakan untuk dapat melihat tingkat efektivitas:

1) Pencapaian Tujuan

   Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus diapandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (a) kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (b) sasaran merupakan target yang kongkrit, (c) dasar hukum

2) Integrasi

   Integrasi yaitu tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mangadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: a) prosedur; b) proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu atau kelompok terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi tersebut terdiri dari dua faktor, yaitu: (a) peningkatan kemampuan (b) sarana dan prasarana.

c. Faktor - faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Setiap organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu secara internal maupun faktor eksternal dari organisasi tersebut. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh steers dalam (Monoarfa:2012) bahwa terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi yaitu :

1. Karakteristik organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi suatu organisasi. Struktur merupakan cara unik suatu organisasi mengatur setiap anggota organisasi sesuai dengan tugs dan tanggung jawabnya masing-masing. Pengertian Struktur meiputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi dan seterusnya. Sedangkan teknologi merupakan mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.

2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan terdiri dari dua aspek, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal biasanya dikenal sebagai iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja misalnya orientasi pada prestasi dan pekerja. Berbeda dengan lingkungan eksternal

yang merupakan kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam organisasi.

3. Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling penting atas efektivitas organisasi. Hal ini dikarenakan perilaku dari para pekerja yang terjadi dalam jangka waktu panjang akan memperlancar atau malah memperlambat suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Kriteria kebijakan dan praktek manajemen terdiri dari penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan juga inovasi organisasi.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan dari kegiatan ataupun program yang telah dilaksanakan dan ditetapkan secara baik, optimal, dan tepat kerja sasaran.

2. Konsep Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja didefenisikan sebagai hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *nonprofit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu (Fahmi, 2010). Kinerja (performance) adalah suatu pencapaian persyaratan pekerjaan yang secara nyata dapat tergambar yang dihasilkan. Kinerja (prestasi kerja) adalah sebagai hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Hasibuan, 2002).

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja SDM, oleh sebab itu setiap organisasi akan berusaha untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang dimilikinya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan. Kinerja sangatlah diperlukan, sebab dengan adanya kinerja maka dapat diiketahui seberapa jauh kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Kata Kinerja berasal dari bahasa Inggris yaitu Job performance atau actual performance atau level of performance yang merupakan tingkat keberhasilan pegawai dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat dan kemampuan, namun kinerja perwujudan dari bakat dan kemampuan itu sendiri dalam bentuk nyata, Sehingga dapat diartikan Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaannya berasal dari organisasi. (Sumardjo,dkk.2018: 193).

Kinerja hakikatnya adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab masing masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Sinambela, 2012:5), sedangkan menurut (Arsyad, 2004 : 20) kinerja merupakan penampilan hasil kerja baik secara kualitas dan kuantitas yang ditinjau dari beberapa dimensi :

1. Sebagai keluaran (output) yaitu melihat apa yang dihasilkan.
2. Prosesnya, yaitu prosedur-prosedur yang telah ditempuh dinilai seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya.
3. Aspek konstektual, yaitu penilaian kerja yang dilihat dari kemampuannya.

Kinerja pada dasarnya berguna untuk menunjukkan tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuannya dengan ukuran-ukuran yang mendekati kepastian. Jika dirujuk pengertian kinerja Pemerintah Daerah menurut Mohamad Mahsun (2006:25) yaitu :

> *"Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi".*

Waluyo (2006) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai suatu tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas perusahaan yang digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang pelaksanaan suatu rencana. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan oleh piha-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Kinerja menurut Bastian (2006), menjelaskan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

a. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi dan sebagainya.

b. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.

c. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

d. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

e. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Dari pendapat yang dikemukakan para ahli tentang kinerja, maka diperoleh gambaran bahwa suatu pekerjaan itu dikatakan efektif, jika proses yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pekerjaan yang cenderung banyak menggunakan biaya dan waktu dan hasilnya kurang optimal tidak dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang efektif.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mendefenisikan kinerja instansi pemerintah sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penentuan indiaktor kinerja harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut (BPKP,2005) :

1. Spesifik.

Berarti unik, menggambarkan objek atau subjek tertentu, tidak berdwimakna atau diinterpretasikan lain. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Agar betul-betul menggambarkan program yang akan dilaksanakan, penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut :

1. Biaya pelayanan (cost of service) yang biasanya diukur dalam bentuk biaya unit.
2. Penggunaan (utilization) dimana indikator untuk komponen ini pada dasarnya mempertimbangkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik.
3. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards), merupakan komponen yang paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subjektif.
4. Cakupan pelayanan (coverage) perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

5. Kepuasan (satisfication) biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerja sama antarunit kerja.

2. Dapat diukur

Secara objektif dapat diukur baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Relevan

Indikator kinerja sebagai alat ukur harus berhubungan dengan apa yang diukur dan menggambarkan keadaan suatu subjek yang akan diukur, berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Tidak bias

Tidak memberikan kesan yang menyesatkan. Indikator kinerja yang ditetapkan harus memperjelas tujuan yang menunjukkan standar kinerja dan efektivitas pencapaian program organisasi.

Untuk mewujudkan kinerja yang tinggi, tentunya diperlukan manajemen kinerja yang baik. Terdapat kesepakatan umum tentang pentingnya implementasi manajemen kinerja pada sektor publik (Pastuszkova dan Palka, 2011). Penerapan manajemen mutlak bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerjasama secara harmonis dan terintegritas antara pemimpin dan bawahan (Wibowo dalam Irfan, 2010).

Dalam melakukan penilaian kinerja birokrasi publik itu diperlukan konsep yang menjadi penilaian organisasi pemerintahan menjadi jelas. Mengikuti Teori Lenvine (1990), ada 3 (tiga) untuk menilai kinerja organisasi pemerintahan publik yakni:

1. *Responsivitas* ,dilihat dari tujuan lembaga sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dapat melaksanakan fungsinya serta memberikan pelayanan dari amanat fungsi yang diembannya, kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. *Responsibilitas*, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
3. *Akuntabilitas Publik*, menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat dengan harapan akan menampung kehendak masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah 'ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Namun bergulirnya ketidakpuasan daerah terhadap pola pembangunan yang berlaku selama pemerintahan saat ini membuat masyarakat di daerah menilai bahwa peraturan daerah yang lama telah menguatkan dominasi pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah, sehingga pemberian otonomi kepada daerah tidak begitu dirasakan secara nyata, yang seharusnya penerapan pengertian demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat“ mengharuskan semua masyarakat Indonesia mendapatkan hasil yang baik atas aspirasi mereka yang ditampung oleh anggota legislatif, dipertimbangkan untuk menjadi peraturan (otonomi) daerah, karena setiap daerah pasti memiliki perbedaan kebutuhan.

b. Faktor - faktor yang mempengaruhi Kinerja

Kinerja di dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh semua orang baik pimpinan maupun bawahan. Tinggi rendahnya kinerja sumber daya manusia sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Aparatur sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai suatu kinerja. Kenyataannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan tidaklah mudah, banyak hambatan-hambatan yang harus dilewati. Menurut A.A. Anwar Prabu dalam Mangkunegara (2003), terdapat beberapa faktor yang terkait dengan pencapain kinerja, faktor tersebut berasal dari

faktor kemampuan dan motivasi aparatur. Berdasarkan hal tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut :

Faktor yang terkait dengan pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation), terdapat hubungan yang jelas antara kinerja (performance), kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Bahwa peran yang dimainkan oleh perilaku organisasi dalam menciptakan hasil dari organisasi sangatlah penting. Peran tersebut pada dasarnya terdiri dari dua faktor yaitu faktor pertama adalah kemampuan (ability), kemampuan hasil interaksi dari pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) seseorang dan faktor kedua adalah motivasi (motivation), sebagai hasil interaksi dari sikap (attitude) dan keadaan kerja (situation) (Mangkunegara, 2005:13-14).

Berdasarkan pengertian diatas, pelayan publik dalam pencapaian kinerja harus memiliki kemampuan dan motivasi kerja. Kemampuan yang dimiliki pelayan publik dapat berupa kecerdasan ataupun bakat.

c. Indikator Kinerja

Kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi para SDM yang ada di instansi, dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat

mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain (Moeheriono 2010 : 61) :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Menilai tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
4. Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

3. Konsep Efektivitas Kinerja

Efektivitas kinerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Pendapat ini didukung Danim (2004) yang mengatakan efektivitas kinerja kelompok, berkaitan dengan kemampuan anggota-anggota untuk memilih atau melakukan sesuatu yang tepat demi kepentingan bersama.

Efektivitas kinerja akan meningkat apabila seseorang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan kerja. Efektivitas kinerja individu dapat

diukur dari keterampilan kerja, peningkatan prestasi, kemampuan untuk beradaptasi, dan mampu menghadapi perubahan (Bass dan Daft, 1989).

Soeprihanto (2001) mengatakan efektivitas kinerja berkaitan erat dengan prestasi kerja seseorang. Efektivitas kinerja dan prestasi tidak hanya dinilai dari hasil secara fisik tetapi juga mencakup pelaksanaan kerja secara keseluruhan yang meliputi kemampuan kerja, hubungan kerja, disiplin kerja, prakarsa dan kepemimpinan. Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan merupakan salah satu indikator kinerja yang efektif dan prestasi yang tinggi.

Efektivitas kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Danim (2004), efektivitas kinerja dipengaruhi oleh interaksi antar sesama yang mencakup hal sebagai brikut :

a. Gaya kepemimpinan, dapat mempengaruhi efektivitas kinerja di antaranya: otoriter, demokratis, pseudo demokratis, situasional, paternalistis, orientasi pemusatan, dan lain-lain.

b. Ketergantungan, dapat mempengaruhi efektivitas kinerja misalnya: ketergantungan penuh, ketergantungan sebagian, ketergantungan situasional, dan tidak ada ketergantungan.

c. Hubungan persahabatan dapat mempengaruhi efektivitas kinerja misalnya: kaku, longgar, situasional, berpusat pada seseorang, dan berpusat secara kombinasi.

d. Kultur dapat mempengaruhi efektivitas kinerja seperti: menghambat dan menunjang.

e. Kemampuan dasar setiap orang untuk berinteraksi misalnya ada yang cepat dan ada yang lambat, situasional, dan tidak berinteraksi sama sekali.

f. Sistem nilai dapat mempengaruhi efektivitas nilai misalnya: terbuka, tertutup, dan prasangka.

Menurut Gibson, Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati sebagai usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas (Bernard H Russell, 1994), sehingga mengetahui sejauh mana efektivitas program-program yang diterapkan pemerintah dengan dengan menghubungkanya dengan factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja pemerintah.

4. Konsep Pemerintah Daerah

a. **Pengertian Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi lima kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga sehingga, setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah

adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Sedangkan yang dikatakan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Menyangkut hal diatas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah diatur secara terperinci dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia memiliki prinsip yang ada dalam penerapannya. Prinsip pelaksanaan daerah secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (2) yang menjelaskan :

> "Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".

b. Peran Pemerintah Kota Dalam Mencegah Pandemi Covid-19

Sawahlunto merupakan salah satu daerah hijau dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 ini. Hal tersebut tidak lepas dari peran seluruh stakeholder di kota yang telah dianugerahi Warisan Budaya Dunia Ke-5 di Indonesia (Kamis, 14 Mei 2020). Menurut Walikota Sawahlunto, Pemerintah Kota Sawahlunto sebagaimana daerah lainnya di Sumatera Barat tengah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua. Semua pemerintah daerah baik kabupaten dan kota sepakat mengambil langkah efektif untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Bagaimana pun intinya adalah pengetatan interaksi, pola hidup bersih dan sehat.

Kepada stakeholder yang diundang untuk mengikuti rapat terkait penanganan Covid-19 ini, diasosiasikanlah penerapan jaga jarak (*social distancing, physical distancing*) serta pola hidup bersih dan sehat. Kemudian diberlakukannya kebijakan PSBB, dimana sekolah diliburkan, pasar pun diatur. Pemerintah Kota sawahlunto menerapkan *one way*, maksudnya adalah pintu masuk dan pintu keluar beda serta dilengkapi dengan perlengkapan cuci tangan. Dan di pintu masuk didirikan posko.

Untuk awalnya memang sulit, tetapi pemerintah tak bosan-bosan nya mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk pengetatan, pada PSBB tahap kedua ditambah lagi posko baru. Tujuan nya adalah untuk orang-orang yang datang dari luar daerah terkategori zona merah, maka mereka harus buat perjanjian akan melakukan isolasi mandiri di tempat tujuan. Surat perjanjian itu dikirimkan ke desa atau daerah tujuannya.

Agar ketika mereka tidak mematuhi selama jangka waktu yang ditentukan, maka petugas bisa saja mengambil paksa mereka untuk dibawa ke tempat karantina yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Sawahlunto.

Langkah pengetatan dipilih karena orang yang masuk Sawahlunto bukan warga asli kota ini melainkan pendatang dari luar daerah. Dampak nya bagi pedagang pasar yaitu Pemerintah Kota memberikan relaksasi yaitu pedagang dibebaskan iuran pasar selama enam bulan. Bahkan pedagang yang meminjam ke UPTD Modal Bergulir dibebaskan juga dari pembayaran angsuran pinjaman selama enam bulan.

Pemerintah selalu menghimbau agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti 3 M yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker saat keluar rumah.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan peneliti maka diperlukan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Agar dapat dilihat dan diketahui apakah penelitian ini berpengaruh dan mendukung penelitian sebelumnya. Maka berikut peneliti kemukakan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini :

1. Ririn Noviyanti Putri pada tahun 2020 yang mengkaji tentang Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja pemerintah Indonesia dalam serta menganalisa langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi Covid-19. Metode yang

digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Hasil yang didapat bahwa Indonesia telah banyak menerapkan berbagai kebijakan dalam pengendalian dan pencegahan Covid-19. Namun, kebijakan tersebut juga harus di dukung oleh kesadaran masyarakat serta sistem kesehatan yang baik. Pandemi Covid-19 ini sangat memiliki banyak dampak baik sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia telah berupya untuk mengendalikan dan memutus mata rantai Covid-19 dengan membuat dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun, dalam menghadapi Covid-19 ini, bukan hanya peran pemerintah dan peran tenaga kesehatan saja yang dapat diandalkan tetapi juga peran dan kesadaran dari masyarakat untuk dapat mengindahkan himbauan dari pemerintah maupun tenaga kesehatan serta meningkatkan kesadaran diri untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

2. Brejita Mamuaja pada tahun 2016 yang mengkaji tentang Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Madado. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pada kinerja Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja sudah efektif dan memadai.

3. Ervita Adelia Putri, Anita Trisiana, Jocellin Dentatama, Kun Widya, Yunuarius Jonggor pada tahun 2020 mengkaji tentang Upaya

Pemerintah Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang wabah baru dan masyarakat harus berjaga-jaga serta melindungi kesehatan. Tata cara penelitian yang di manfaatkan merupakan tata cara kualitatif. Hasil riset dipakai untuk meningkatkan pemahaman khalayak agar bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara konsep yang akan diteliti dengan tujuan yang dapat digunakan untuk membantu jalannya penelitian. Penelitian ini akan meneliti tentang Efektivitas Kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Melalui Satuan Tugas Penanganan Covdi-19 Dalam Mencegah Penyebaran Pandemi Covid-19. Berdasarkan dari latar belakang masalah dan kajian teoritis, maka secara sederhana kerangka konseptual yang penulis gambarkan adalah sebagai berikut :

Kerangka Konseptual:

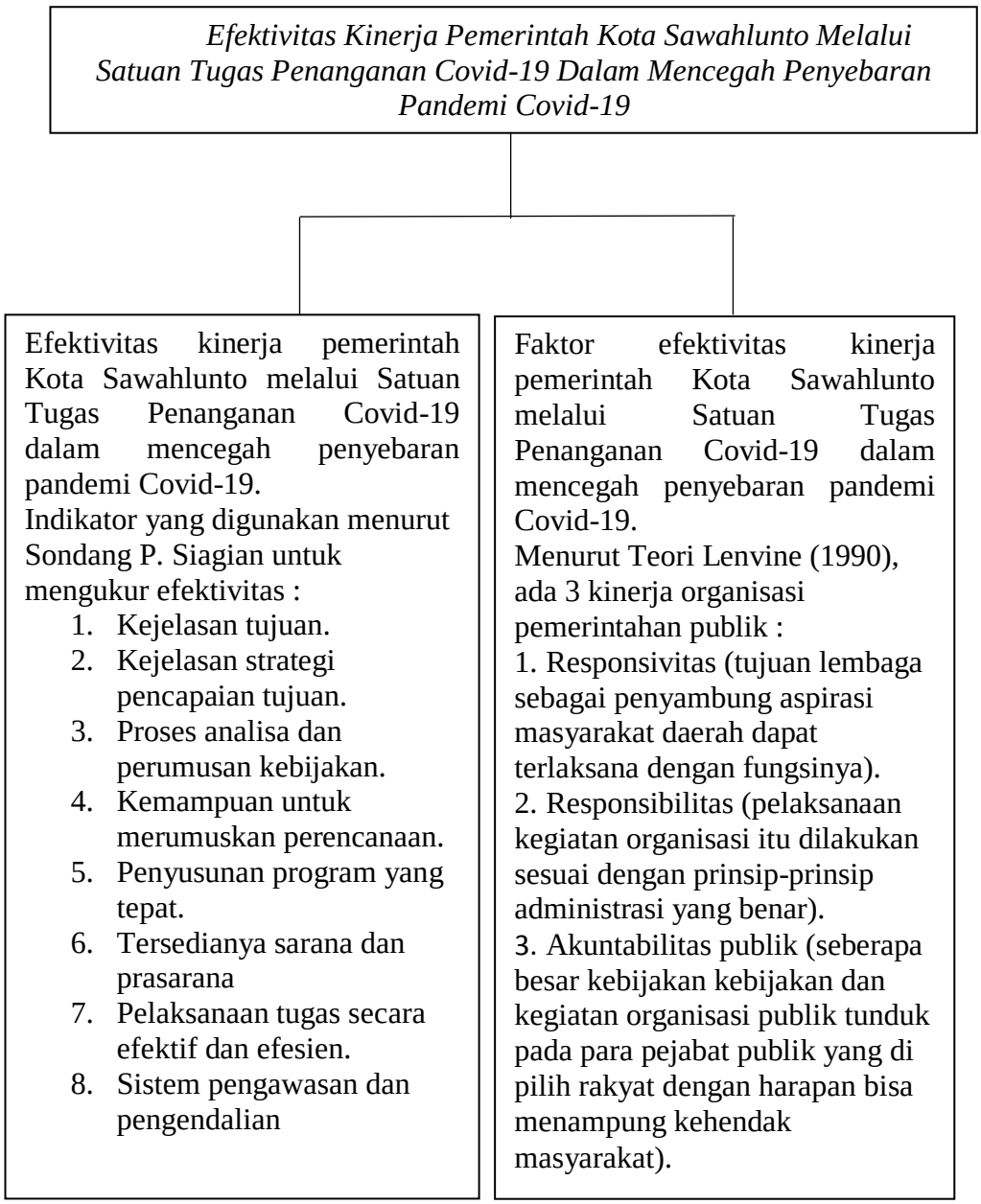

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan antara lain:

Efektivitas kinerja pemerintah Kota Sawahlunto melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dapat disimpulkan bahwa dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Sawahlunto dapat terlaksana dengan baik, apabila organisasi yang berada di dalamnya dapat berjalan dengan lancar dan efektif, organisasi tersebut akan menjadi penentu bagi masa depan masyarakat, sehingga pelaksanaan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan dapat terlaksana dengan efektif sesuai yang diharapkan. Aturan pemerintah yang tepat dan tegas adalah kunci dari keberhasilan penekanan kenaikan Covid-19.

Namun dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa pencegahan penyebaran Covid-19 ini tidaklah berjalan dengan efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, tetapi pemerintah Kota Sawahlunto sudah berusaha untuk membuat dan menerapkan kebijakan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 agar dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat walaupun belum masih ada yang perlu diperbaiki seperti dalam menerapkan kebijakan tersebut. Maka dengan itu masyarakat akan lebih sadar lagi terhadap pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, berikut beberapa hal terkait yang dapat disarankan:

1. Pemerintah yang terkait dengan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 harus menyediakan anggaran yang berlebih agar bisa digunakan untuk kejadian yang tidak terduga seperti kenaikan kasus positif Covid-19 akibat rendahnya kesadaran masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan dibutuhkan ketegasan dalam menegakkan peraturan sehingga masyarakat dapat memahami situasi dan kondisi di saat pandemi ini.
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemerintah harus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penerapan kebijakan. Karena setiap peraturan dan kebijakan yang diterapkan ini masih menimbulkan masalah bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan agar mudah diterima masyarakat. Sehingga masyarakat bisa berperan aktif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.A Anwar Prabu Mngkunegara. 2005. *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

A.A Anwar Prabu Mngkunegara. 2003. *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Lanvine, Charless H., et al.1990. *Public Administration : Chalenges, Choices, Concequences, Illions* : Scot Foreman.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Siagian, Sondang. P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi.

Sinambela, Lijan Poltak. Kinerja Pegawai. Graha Ilmu : Yogyakkarta.

Sondang, P.Siaigian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Danim, Sudarwan. 2004. Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabet.

Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabet.

Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya.

Artikel Jurnal

Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 12(01), 59–70.

Bima Jati Bima Jati, Gilang Rizki Aji Putra(2020). *Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara*. Vol.7, No.5.

Aprista Ristyawati (2020). *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Covid 19 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat*

UUD NRI Tahub 1945. Jurnal Administrasi Hukum & Governance : Vol 3, Isu.2. ISSN. 2621-2781

Hakim, Abdul. 2006. *Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Riset Bisnis Indonesia. Vol 2 No (2).

Monoarfa, H. 2012. *Efektivitas dan Efisensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik : Suatu Tinjauan Kinerja lembaga Pemerintahan*. Diakses dari http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/891 pada tanggal 1 Desember 2020.

Sevia PS. 2018. *Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai*. Padang. Universitas Negeri Padang.

Noviyanti, Ririn Putri. 2020. *Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Universitas Batanghari, Jambi. Jurnal Ilmiah. Volume 20 Nomor 2. hal 705-709. ISSN 2549-4236

Mujani, Saiful. 2020. Asesmen Publik Atas Kinerja Pemerintah Indonesia Mengenai Wabah Covid-19 : Sebuah Penjelasan Ekonomi Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Tanggerang Selatan Banten. Jurnal Penelitian Politik. Konstelasi Politik Di Tengah Pandemi Covid19. Vol. 17, No. 2.

Ahmad Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.

Berita Online

https://www.beritaminang.com/berita/7620/tak-gunakan-masker-36-warga-kota-sawahlunto-terjaring-operasi-yustisi.html. Diakses pada tanggal (25 Oktober 2020)

97/dua-kasus-pertama-covid-19-terkonfirmasi-sawahlunto-kini-tak-lagi-zona-hijau. Diakses pada tanggal (24 Mei 2020)

Jurnalsumbar.com/2020/05/sosialisasi-pengketatan-relaksasi-kunci-sukses-sawahlunto-hadapi-covid-19/

http:/padangmedia.com/kasus-positif-covid-19-di-sawahlunto-melonjak-bertambah-23-orang/

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Adaptasi Kebiasaan Baru* di Provinsi Sumatera Barat.

SK Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/81/WAKO-SWL/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kota Sawahlunto

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan